

Kajian Ketimpangan Antarwilayah Kabupaten/Kota pada Pusat Pertumbuhan Utama Pulau Sulawesi

Muhammad Mario Arandi^{1*}, Sri Undai Nurbayani², Hamrullah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,
muhammadmarioarandi@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,
sri.undai@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin, Indonesia,
hamrullah.feunhas@yahoo.com

*E-mail Korespondensi: muhammadmarioarandi@gmail.com

ABSTRAK

Ketimpangan wilayah merupakan sebuah masalah ekonomi yang umum di negara berkembang, dimana adanya ketimpangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal. Masalah ketimpangan wilayah menjadi salah satu alasan utama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemerataan pembangunan di 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah, investasi, dan indeks pembangunan manusia yang merupakan instrumen penting dalam mengurangi tingkat ketimpangan wilayah. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan “*fixed effect*” dan dalam kurun waktu 2016-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat ketimpangan wilayah. Sedangkan untuk variabel investasi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan wilayah, hal ini disebabkan karena investasi dan indeks pembangunan manusia yang belum merata.

Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

Regional inequality is a common economic problem in developing countries, where there is an imbalance in the level of social welfare in developed regions with lagging regions. The problem of regional inequality is one of the main reasons for the South Sulawesi Provincial government to carry out an equitable distribution of development in 24 districts/cities in South Sulawesi Province. Therefore, this study aims to analyze the impact of government spending, investment, and the human development index which are important instruments in reducing regional inequality. Data were analyzed using panel data regression with a "fixed effect" approach in the period 2016-2021. The results of the study show that the variable government spending does not effect reducing regional inequality. As for the investment variable and the human development index, it has a positive and significant influence on the level of regional inequality, this is because the investment and human development index are not evenly distributed.

Keywords: Regional Inequality, Government Spending, Investment, Human Development Index

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan dari masalah ketimpangan, kemiskinan, dan juga pengangguran. Tiga faktor ini merupakan permasalahan ekonomi utama yang dialami oleh negara-negara berkembang, dengan menurunnya tingkat ketimpangan, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran maka dapat dikatakan bahwa pembangunan di daerah tersebut berhasil. (Todaro & Smith, 2003)^[1]. Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi. Menurut Subandi (2012)^[2] pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*Income per-kapita*) dalam jangka panjang. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan harapannya kemiskinan dan ketimpangan wilayah dapat berkurang. Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari negara Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.139.531 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022)^[3] yang tersebar di 24 kota/kabupaten menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dari kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan sumber daya alam dan karakteristik wilayah yang dimiliki tiap daerah menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengatasi masalah ketimpangan wilayah yang terjadi. Akibat perbedaan karakteristik wilayah yang ada maka dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang di masing-masing wilayah.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Sulawesi Selatan bisa meningkatkan pengeluaran pemerintah agar infrastruktur dan kualitas pendidikan serta kesehatan dapat merata di tiap wilayah. Hal ini karena pemerintah memiliki peranan dalam mengelola keuangan daerah untuk kepentingan bersama sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut pada pasal 26 dan 27 dijelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selain pengeluaran pemerintah, investasi juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, peranan investasi dalam perekonomian adalah sebagai faktor produksi yang meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah sehingga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) meningkat yang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Investasi merupakan salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gulirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Suindyah, 2011)^[4].

Umumnya, investasi berfokus pada peningkatan modal fisik seperti bangunan, mesin-mesin produksi dan lain sebagainya sebagai faktor produksi untuk meningkatkan output, namun investasi tidak terbatas dengan pembentukan modal fisik saja melainkan juga ada pembentukan modal manusia (*human capital*) yang menjadi subjek dari investasi. Jhingan (2014)^[5] mengungkapkan pembentukan modal manusia sendiri adalah sebuah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Karena pada dasarnya modal fisik akan lebih optimal penggunaannya apabila kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Pembentukan modal manusia berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan oleh Romer (1990)^[6] dalam penelitiannya menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan kontributor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi terutama dalam penggunaan teknologi yang semakin maju maka memerlukan pengetahuan serta inovasi yang lebih matang sehingga produktivitas produksi semakin efisien.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengeluaran pemerintah dan investasi dapat membantu mengoptimalkan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti ketimpangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Ketimpangan Antarwilayah Kabupaten/Kota pada Pusat Pertumbuhan Utama Pulau Sulawesi”.

Ketimpangan Wilayah

Menurut Sirojuzilam (2005)^[7] ketimpangan wilayah adalah ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah didalam wilayah suatu Negara. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik, sumberdaya, dan keadaan demografis wilayah yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit oleh bank kecil, dan peningkatan tenaga kerja pada usaha kecil terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pemerataan pendapatan, sehingga dapat menjadi faktor penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan (Anwar & Mangilep, 2019)^[8].

Faktor-faktor seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur berperan penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di Indonesia. Ketimpangan ini umumnya terjadi akibat distribusi investasi dan pembangunan yang tidak merata antarwilayah (Paddu, 2017)^[9]. Dampak dari ketimpangan wilayah tersebut mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut Myrdal (1957)^[10] menjelaskan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) yang mana akan mendominasi pengaruh yang lebih menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan suatu wilayah, yang mana akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat dan bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan wilayah harus difokuskan untuk membawa dampak *spread effect* yang menguntungkan wilayah sekitarnya sehingga ketimpangan dapat berkurang.

Produksi padi merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat pertanian dataran tinggi Sulawesi Selatan. Selain membantu menjaga ketahanan pangan, produksi padi juga memberikan lapangan pekerjaan dan merupakan sumber utama pendapatan bagi masyarakat lokal (Mangilep, 2016)^[11]. Sehingga berpotensi mengurangi ketimpangan antarwilayah jika pengelolaannya dilakukan secara merata.

Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah berperan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa publik yang tak dapat disediakan sektor swasta. John Maynard Keynes dalam teorinya mengatakan bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Barang publik memiliki ciri khas yaitu tersedianya adalah karena campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah (karena harga disubsidi pemerintah), tidak dapat dikecualikan (*non-excludable*), karena dapat dinikmati oleh orang lain dan tidak pula bersaing (*non-rival*). Dalam hal ini fokus penelitian pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ketiga elemen ini sangat penting dan pemerintah bertanggungjawab dalam hal menyediakan sarana dan prasarana ini untuk publik/masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkat pemerintahan (Jr. & Johnson, 1998)^[12]. Faktor-faktor seperti belanja infrastruktur, belanja ekonomi, belanja pembangunan manusia, dan indeks pembangunan manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Belanja ekonomi dan belanja pembangunan manusia mempengaruhi ketimpangan secara tidak langsung melalui peningkatan indeks pembangunan manusia, sementara belanja infrastruktur tidak memiliki dampak yang signifikan (Fatmawati,dkk.,2024)^[13].

Desentralisasi fiskal di Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer antar pemerintah, memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Menyalurkan dana yang lebih besar untuk program penanggulangan kemiskinan daripada belanja operasional, dapat berdampak lebih besar pada kesejahteraan masyarakat (Nursini, 2019)^[14]. Dana Desa dapat berperan sebagai penguat atau melemahkan hubungan antara pertumbuhan sektor pertanian, migrasi penduduk, dan perubahan pemanfaatan lahan terhadap kemiskinan di wilayah pedesaan. Peningkatan jumlah Dana Desa telah terbukti mampu memperkuat hubungan antarvariabel tersebut, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia (Razak,dkk. 2023)^[15].

Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang menambah stok modal untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa atau pendapatan di masa yang akan datang. Stok modal yang dimaksud adalah pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama yang digunakan untuk proses produksi (Dornbusch & Fisher, 2004)^[16]. Kemudian, Smith dalam Deliarnov (2005)^[17] menjelaskan cara terbaik untuk melakukan investasi adalah membeli mesin-mesin dan peralatan, adanya mesin modern tentu akan membuat produktivitas tenaga kerja meningkat. Peningkatan produktivitas mengakibatkan produksi yang dilakukan akan bertambah sehingga akan meningkatkan profit yang didapatkan.

Investasi juga merupakan salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input. Investasi, upah minimum, dan program kredit usaha rakyat (KUR) memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, distribusi investasi yang merata dan penerapan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi regional memengaruhi efektivitas kebijakan ini (Nursini, 2022)^[18]. Pemerintah berusaha mengatasi kemiskinan melalui kebijakan fiskal seperti program bantuan sosial jangka pendek, masyarakat harus dimotivasi untuk menjadi lebih produktif dan mandiri. Usaha kecil dan menengah (UKM) sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PDB, dan mendorong kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, UKM masih menghadapi tantangan terkait kapasitas sumber daya manusia, akses ke sumber daya produktif, dan kesulitan untuk beradaptasi dengan kemajuan pasar dan teknologi (Mangilep, dkk.,2022)^[19].

Jika arus investasi ke suatu negara berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang ada. Selanjutnya, peningkatan stok kapital ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang menambah aktivitas perekonomian negara tersebut (Rizal, 2014)^[20].

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah sebuah indikator yang mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai alat untuk mengukur aspek kualitas dari pembangunan dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang serta untuk

mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Badan Pusat Statistik, 2022)^[21]. Konsep IPM ini pertama kali dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yang kemudian hingga saat ini indikator IPM digunakan secara berkala untuk melihat kualitas pembangunan. Nilai indeks pembangunan IPM berkisar 0-100 yang nilainya diklasifikasikan sebagai berikut;

- <60 status IPM rendah
- $60 \leq \text{IPM} < 70$ status IPM sedang
- $70 \leq \text{IPM} < 80$ status IPM tinggi
- >80 status IPM sangat tinggi

Indikator IPM sangat penting untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam pembangunan, Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

METODOLOGI KAJIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah yaitu, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik adalah pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, PDRB Sulawesi Selatan, dan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk investasi diperoleh dari informasi yang disediakan oleh DPMPTSP Sulawesi Selatan.

Ketimpangan wilayah dalam penelitian ini menggunakan indeks theil sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rumus dari indeks theil yang dikutip dari Sjafrizal (2012)^[22] ialah:

$$T = \sum_{i=1}^n (y_i/Y) T_d + \sum_{i=1}^n (y_i/Y) \log \left(\frac{\frac{y_i}{Y}}{\frac{n_i}{N}} \right)$$

$$T_d = \left(\frac{Y_{ij}}{Y_j} \right) \log \left(\frac{Y_{ij}}{Y_j} \right) / \left(\frac{n_{ij}}{N_j} \right)$$

$$T = \sum_{i=1}^n (Y_i/Y) T_d + T_{BR}$$

$$T = T_{WR} + T_{BR}$$

Keterangan:

- T: Indeks theil
- y_i : PDRB kabupaten/kota di wilayah i
- Y: PDRB wilayah referensi
- n_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota di wilayah i
- N: Jumlah penduduk wilayah referensi
- y_{ij} : PDRB perkapita kabupaten/kota i di provinsi j
- Y_j : PDRB perkapita di provinsi j
- n_{ij} : Jumlah penduduk kabupaten/kota I di provinsi j
- N_j : Jumlah penduduk di provinsi j
- T_{WR} : Indeks theil dalam wilayah
- T_{BR} : Indeks theil antar wilayah

Dalam meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. maka digunakan regresi data panel dengan persamaan:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (3.1)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.2)$$

Persamaan (3.2) kemudian di transformasikan menjadi linear dalam bentuk logaritma natural (Ln) seperti pada persamaan estimasi berikut ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah

β_2 = Koefisien pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah

β_3 = Koefisien pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah

I = Cross section

t = Time series

μ = Error term

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Hasil Kajian

Adapun hasil estimasi regresi data panel untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah, yakni:

| Variabel | Koefisien | Standar Error | Uji T | Signifikansi |
|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------|
| C | 0.305789 | 1.096022 | 0.278999 | 0.7808 |
| Pengeluaran Pemerintah (LN _{X1}) | -0.012855 | 0.040197 | -0.319810 | 0.7497 |
| Investasi (LN _{X2}) | 0.001136 | 0.000494 | 2.300019 | 0.0233 |
| Indeks Pembangunan Manusia (X ₃) | 0.001413 | 0.000565 | 2.499975 | 0.0139 |
| R-Squared | 0.989579 | F statistic | | 409.0457 |
| Adjusted R-Squared | 0.987159 | Prob(F statistic) | | 0.000000 |

Sumber: Data Sekunder menggunakan Eviews 10, diolah 2023

Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.12 maka diperoleh nilai *R square* sebesar 0.989579 yang berarti, 98 % variasi perubahan variabel ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel pengeluaran pemerintah, investasi, dan indeks pembangunan manusia. Sisanya sebesar 2% ditentukan oleh variabel atau faktor lainnya diluar model penelitian ini. Pada pengamatan hasil estimasi hanya variabel investasi dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen dan dalam model dapat dilakukan dengan melakukan uji simultan (Uji F). Menurut (Gujarati, 2013) ^[23] Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai probabilitasnya sebesar 0.00000 yakni lebih kecil dari 0.05 (5%) Jadi, dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, investasi dan indeks pembangunan manusia secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk melihat besarnya perubahan ketimpangan wilayah yang diakibatkan oleh perubahan variabel yang mempengaruhinya, maka dapat melihat hasil koefisien regresi dan signifikansi nya masing-masing variabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Sedangkan untuk investasi memiliki koefisien sebesar 0.001136 dan secara signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah, ini menandakan setiap kenaikan investasi sebesar 1% maka meningkatkan ketimpangan wilayah sebanyak 0.00001136. Untuk indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah dengan koefisien 0.001413 yang menandakan setiap kenaikan indeks pembangunan manusia sebanyak 1 satuan maka meningkatkan ketimpangan wilayah sebanyak 0.001413.

Diskusi

Alasan mengapa pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan pada akun pengeluaran pemerintah lebih banyak pengeluaran yang dianggarkan kepada belanja pegawai yang notabene pengeluarannya tidak langsung mengarah kepada masyarakat. Tentu hal ini akan mempengaruhi signifikansi pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengkaji kembali anggaran pemerintah dan mengoptimisasikan anggaran yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga ketimpangan wilayah dapat berkurang secara signifikan ditambah pengeluaran pemerintah memiliki korelasi negatif pada ketimpangan wilayah. Dana otonomi khusus bidang infrastruktur terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi daerah, sementara dana pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara tidak langsung, melalui IPM, dana otonomi khusus bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Anwar,dkk.,2020)^[24].

Investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah disebabkan realisasi investasi antar wilayah sangat timpang, investasi yang tinggi di wilayah A dan investasi yang rendah di wilayah B akan meningkatkan ketimpangan wilayah, ditambah investor tentu memilih menanam modalnya terhadap wilayah potensial dan yang menguntungkan. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dengan kewenangan otonomi, mobilitas faktor produksi, serta tingkat inflasi memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan regional masih signifikan karena distribusi pembangunan yang tidak merata antarwilayah (Paddu, 2017) ^[25]. Wilayah yang potensial dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, namun yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana wilayah-wilayah lain harus juga dioptimalkan sehingga investasi yang ditanam menjadi lebih merata dan dalam jangka panjang tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampak ini sangat bergantung pada kondisi wilayah, termasuk infrastruktur dan distribusi ekonomi yang merata (Razak & Soedarmono, 2023) ^[26]. Di Indonesia, adopsi energi terbarukan sangat penting untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi masalah terkait kesiapan infrastruktur, peraturan, dan distribusi ekonomi antarwilayah (Paddu,dkk.,2024) ^[27].

Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah ialah dikarenakan kurang meratanya indeks pembangunan manusia di tiap wilayah, di Provinsi Sulawesi Selatan terhitung hanya satu wilayah (Kota Makassar) yang memiliki indikator indeks pembangunan manusia sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga wilayah (Kota Pare-Pare, Kota Palopo, dan Kabupaten Enrekang) yang memiliki indeks pembangunan manusia tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sisanya dari wilayah lain berada dalam indikator indeks pembangunan manusia sedang. Sehingga hal ini menyebabkan indeks pembangunan manusia belum mampu untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadikan indeks pembangunan yang tidak merata sebagai bahan pertimbangan untuk fokus dalam meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal yang kedepannya akan dapat mengurangi ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja sama untuk meningkatkan investasi terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tertinggal, diharapkan pemerintah dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tertinggal dengan memanfaatkan sektor unggulan yang dimiliki di wilayah tersebut, yang kemudian wilayah-wilayah tertinggal dapat mengejar wilayah yang maju. Selain itu pemerintah juga perlu untuk fokus dalam pengembangan dan pembangunan di wilayah tertinggal sehingga terjadi pemerataan pembangunan di tiap-tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyarankan bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil data lebih banyak terkait pengeluaran pemerintah, investasi dan IPM terhadap ketimpangan wilayah untuk memberikan gambaran lebih luas terhadap permasalahan ketimpangan wilayah.

REFERENSI

- [1] Anwar, A. I., Firianti, R., & Mangilep, M. A. A. (2022). Analysis of Financial Inclusion and Its Impact on Poverty in South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering*, Vol. 7 No. 2.
- [2] Anwar, A. I., & Mangilep, M. A. A. (2019, August). The Effects of Economic Growth, Micro Finance Institution, and Micro and Small Enterprises to Income Inequality in South Sulawesi. In *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)* (pp. 543-546).
- [3] Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- [4] Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (2022). *Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan*.
- [5] B Jr., R. D., & Johnson, R. W. (1998). *Public Budgeting System*. Boston: Aspen Publisher.
- [6] Deliarnov. (2005). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- [7] Dornbusch, Rudiger & Fischer. (2004). *Macroeconomics* (9th ed). Mc Graw – Hill Companies. New York.
- [8] Fatmawati, Alfonso, M.E., Nursini, & Abd Rahman, R. (2024). Government Expenditure, Human Development Index and Regional Inequality in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 4810-4820.
- [9] Gujarati, D. N. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Mangunsong, R. C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- [11] Mangilep, M. A. A. (2016). The Importance of Paddy Rice Production for the Agricultural Communities in the Highland of South Sulawesi. In *The 7th Indonesia Japan Joint Scientific Symposium*. Chiba University.
- [12] Myrdal, Gunnar. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. Gerald Duckworth & Co. Ltd. London.

- [13] Nursini, N. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics & Sociology*, 12(1), 270-368.
- [14] Paddu, A. H. (2017). Factor affecting in economic growth and regional inequity in Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 14(2), 25-37.
- [15] Paddu, A. H. (2017). The Influence of Decentralization with Autonomy Power, Decentralization with Authority Power, Factor Mobility, the Construction Cost Index, and Inflation Rate Toward Labor Absorption Rate. Implications toward Regional Inequity in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences (JAES)*, 12(51), 1433-1442.
- [16] Razak, A. R., Fernandes, A. A. R., & Saifullah, N. I. (2023). Moderation of village funds and mediation of agricultural sector growth on poverty in rural areas. *International Journal of Economics and Business Research*, 26(4), 463-483.
- [17] Razak, A. R., & Soedarmono. (2023). Revisiting the finance-growth nexus: Global evidence. *Economics Bulletin*, 43(3), pp. 1214–1224.
- [18] Rizal, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang (Studi Kasus Pada Tahun 1998-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No.1, 400-420.
- [19] Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, Vol. 98 No.5, S71-S102.
- [20] Saudi, N. D. S., Reviane, I. T. A., Paddu, A. H., Agustin, G., Djam'an, F., & Sabbar, S. D. (2024). Carbon neutrality and sustainable development: an empirical study of Indonesia's renewable energy adoption. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(4), 526-537.
- [21] Sirojuzilam. (2005). *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- [22] Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [23] Subandi. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: AlfaBeta.
- [24] Suindyah, S. D. (2011). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekuitas*, Vol.15 No.4, 477-500.
- [25] Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Betaubun, S., Lamalewa, F., Kore, E. L. R., & Anwar, A. I. (2020, March). The allocation of special autonomy funds and their impact on regional economic inequality in Papua Province. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012031).
- [26] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- [27] Yuliany, N., & Nursini, M. (2022). The Impact of People's Business Credit Program, Minimum Wage, and Investment on Indonesian Poverty. *FWU Journal of Social Sciences*, 16(2), 125-141.